

**Judul** : Delamatkan Rakyat Dari Covid. Puteri : Gunakan Anggaran Dengan Cepat Dan Tepat  
**Tanggal** : Senin, 13 September 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 4

## Selamatkan Rakyat Dari Covid Puteri: Gunakan Anggaran Dengan Cepat Dan Tepat



**Puteri Anetta Komarudin**

PANDEMI Covid-19 harus dijadikan momentum bagi daerah untuk mandiri secara fiskal, tidak terlalu “menyusu” ke pusat untuk melakukan pembangunan.

Hal itu diutarakan Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin saat menjadi *keynote speaker* Seminar Nasional Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal (PKAKN Setjen) DPR terkait Kemandirian Fiskal Daerah. Puteri berharap, seminar ini, dapat menjadi bahan untuk mengoptimalkan konsep desentralisasi fiskal, agar otonomi daerah mampu berjalan dengan semestinya.

“Daerah tidak bergantung lagi dengan pendapatan dari pusat, dan semestinya daerah bisa mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan dari berbagai kekayaan alam dan lain-lainnya yang berada di daerah,” kata Puteri, Senin (06/09).

Puteri juga menekankan,

dalam proses meningkatkan kemandirian fiskal daerah perlu adanya prinsip keadilan dan pemerataan pada dana transfer yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kami sangat menunggu hasil kajian yang akan dihasilkan dari diskusi ini dan semoga nanti hasil kajiannya bisa kita pakai di Komisi XI untuk membahas daftar inventarisasi masalah bersama dengan pemerintah,” tuturnya.

Politisi muda Partai Golkar ini juga menjelaskan bahwa permasalahan yang saat ini terjadi di dalam implementasi kemandirian fiskal daerah adalah tidak hanya sekedar sistem administrasi, namun konsep hubungan keuangan daerah itu sendiri yang perlu dititikberatkan, utamanya dalam proses pembahasan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Oleh karena itu, Puteri berharap, seluruh proses ini dapat meluruskan kembali konsepsi desentralisasi fiskal, yang muaranya adalah pada kemandirian fiskal daerah. Sehingga nanti daerah tidak lagi kebingungan dalam menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.

Misalnya, karena kita lihat contohnya penggunaan dana PEN, di situ hanya sedikit daerah yang mampu untuk *manage* keuangannya dan menyerap anggarannya secara cepat, sementara banyak sekali daerah yang mengalami kesulitan karena berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menggunakan dana tersebut. ■ KAL